



# LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Pelaksanaan Penilaian Resiko merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Lamongan, April 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan



**IP. JUNIF SYARIF, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650630 199202 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini .....	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	5
BAB III PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	8
A. Penetapan Kontekas/Tujuan .....	8
B. Hasil Identifikasi Resiko .....	12
C. Hasil Analisis Resiko .....	18
D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan .....	26
E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan .....	28
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI. ....	36
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN . ....	41
BAB VI PENUTUP .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/193/KEP/413.013/2023 tahun 2023 tentang Struktur Pengelolaan Resiko Kabupaten Lamongan.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Pengelolaan Resiko dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

#### 2. Tujuan

Pengelolaan Resiko bertujuan untuk (1) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, (2) mewujudkan budaya pengendalian intern, (3) mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP, (4) memberikan rencana pemecahan masalah

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan risiko kegiatan (operasional) OPD.



## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Olehkarena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal Control Environment Evaluation (CEE) kepada 37 (tiga puluh tujuh) responden menunjukkan hasil lingkungan pengendalian menunjukkan hasil yang memadai meskipun masih ada catatan yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 1.  
Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian  
pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2025

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

#### B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukkan kondisi yang memadai tapi masih diperlukan perbaikan agar dapat mencapai suatu kondisi yang di harapkan sebagai tujuan adanya pengelolaan resiko ini . Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.  
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian  
Pada Dinas pendidikan Tahun 2025

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti tapi masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku	Penegakan Integritas dan nilai etika sudah terbangun dengan baik dimana pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan ini perlu di tingkatkan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2025



NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi tetapi belum dilakukan secara berkala.	Komitmen Terhadap Kompetensi di Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah diterapkan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala dengan membuat perencanaan dan target yang harus dicapai dalam setiap pelatihan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2025
3	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
	Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah terbangun dengan baik tetapi masih ada Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) sehingga OPD perlu melakukan analisis dan pengajuan formasi ASN .	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2025
4	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
	Masih ada kriteria pen delegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Pimpinan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2025

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
		dipahami oleh pegawai, kemudian direviu dan dimutakhirkan secara berkala		
5	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Untuk Sub Unsur Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pimpinan OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai, dan harus dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga antara kinerja sebanding dengan penghasilan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2025

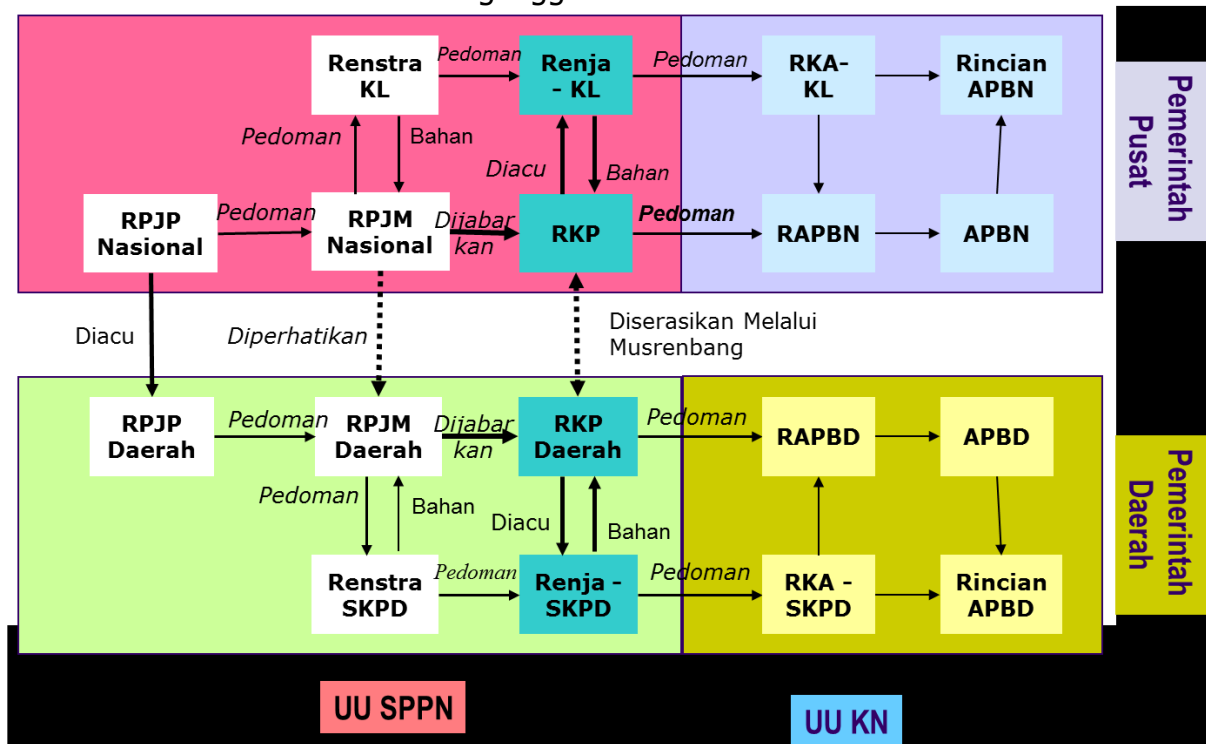
### BAB III

## A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan OPD dalam satu masa pemerintahan kepala daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja OPD (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja OPD.

Dalam kerangka perencanaan tersebut harus ada keselarasan antar dokumen sehingga masing-masing tingkatan akan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Secara rinci keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut tertuang dalam gambar berikut

Gambar 1.



Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Visi**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :

**Visi :**

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.**

Makna dari atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni

masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

**b. Misi**

Sedangkan Untuk **Misi** Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 2 Pemerintah Daerah yaitu :

**“ Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman “**

**b. Tujuan**

Untuk merealisasikan visi dan misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan mendukung tujuan yaitu:

**” Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing”**.

**c. Sasaran**

sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran pemerintah daerah yaitu :

**” Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan”**

**Keselaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026**

<b>Misi 2</b>				<b>RPJMD</b> <b>Kabupaten</b> <b>Lamongan</b> <b>Tahun 2021-2026</b>
Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman				
<b>Tujuan 1</b>				
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
<b>Sasaran 1</b>				
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
<b>Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Penanggungjawab</b>	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
	2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan	
	3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Penilaian dari inspektorat	



## **B. Hasil Identifikasi Risiko**

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertian gdalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renjadan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, Eselon 4 dan Sub Koordinator.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.  
Hasil Identifikasi Risiko

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan</b>						
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	Kepala Dinas pendidikan	1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	Eksterna I	C	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	Kepala Dinas pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	Eksterna I	C	1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	Kepala Dinas pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	Internal	C	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Guru

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Resiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	Kepala Dinas pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	Internal	C	1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah Dinas Pendidikan</b>						
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	Kepala Dinas, Kabid dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	Internal	C	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	Internal	C	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterim	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Resiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
		SD, SMP dan PNF				pemberian bantuan	
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	Internal	C	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat	Dinas Pendidikan, Pemda dan Masyarakat
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan	Instansi, Pemda dan Masyarakat
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Guru/Tenaga Pendidik
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Sataun pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP 2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran	Satuan Pendidikan
8	Adanya satuan	Kepala	Keterbatasan tenaga SDM	Internal	C	Banyak Laporan Yang tidak sesuai dengan	Dinas Pendidikan dan satuan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Resiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Bendahara terutama untuk PAUD dan SD			JUKNIS	pendidikan
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Internal	C	Terlambat menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT	Internal	C	1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal	Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidika
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	Internal	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan Tenaga pendidik dan kependidikan
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelola sekolah yang masih perlu	Internal	C	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
		dan PNF	perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan				
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan pserta Didik yang berhak menerima
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleg peerta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan Pesrta Didik
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,PN F	Kendala cuaca yang tidak menentu Pencairan dana yang terlambat	Ekstern al	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Disdik, Kontraktor dan satuan pendidikan
16	Koordinasi dan Komunikasi yang belum berjalan dengan baik	Dinas Pendidikan, PGRI, HIPMA PAUDI	1. Miscommunication antar stakeholder 2. Tumpang tindih program 3. Keterlambatan implementasi	Internal	C	1. Banyak Program tidak berjalan sesuai rencana 2. Terjadi banyak kendala yang tidak terselesaikan dengan tuntas	Disdik, PTK, dan Mintra



No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
17	Kerja sama melanggar regulasi, peraturan pemerintah, atau standar pengadaan barang/jasa.	Dinas Pendidikan, Pihak Ketiga	Salah satu pihak tidak memahami secara benar tentang regulasi yang berlaku Pengadaan barang/jasa tidak sesuai standar yang telah di sepakati bersama	Eksternal	C	1. Banyak aturan yang dilanggar 4. Adanya temuan oleh Auditor	Disdik
18	Realisasi barang/jasa dengan spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi yang diatur dalam kontrak	PPK/PPTK	1. Barang sudah tidak tersedia di pasaran atau diskontinue. 2. Perencanaan oleh tim teknis /konsultan kurang cermat.	Eksternal	C	1. Pekerjaan tidak Tepat sasaran 2. adanya temuan auditor	Disdik dan mitra penyedia

### C. Hasil Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dan skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Kategori Dampak Risiko Skala 5**

Katagori Dampak	Skor	Operasional Dampak resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputase	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif,tersebar luas dibanyak media masa	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegaitan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatis, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun tidak material	Tidak Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Tabel5.**  
**Tabel Tingkat Kemungkinan/Probabilitas**

Level Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
<b>Hampir tidak terjadi</b>	<b>1</b>	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
<b>Jarang terjadi</b>	<b>2</b>	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
<b>Kadang terjadi</b>	<b>3</b>	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
<b>Sering terjadi</b>	<b>4</b>	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
<b>Hampir pasti terjadi</b>	<b>5</b>	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 6.  
Kriteria Penerima Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 – 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01-4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
9,01 – 12,00	Tinggi	Harus menjadi Perhatian manajemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Penentuan risiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Diagram1.**  
**Penilaian Risiko Prioritas**

Matriks Analisis Risiko			Dampak Konsekuensi				
			1	2	3	4	5
			Tdk. Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					
Keterangan			Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Tabel  
Daftar Resiko Prioritas

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan</b>							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	10	Kepala Dinas pendidikan	1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	9	Kepala Dinas pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	11	Kepala Dinas pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	5	Kepala Dinas pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik



N o	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	9	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi
2	Dinas Pendidikan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B
3	Dinas Pendidikan	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan
4	Dinas Pendidikan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	11	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan

N o	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						pendidikan	kualitas pendidikan
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	7	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	8	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	1. Sataun pendidikan tidak menrima dana BOS dan BOP 2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran
8	Dinas Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS
9	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	12	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT	1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal
11	Dinas Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat	ROO.24.01.25.11	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

N o	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		terbentuk				antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	
12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	10	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Pembangunan tidak selesai tepat waktu
16	Dinas pendidikan	Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dengan baik antara Disdik dan Mitra	ROO.24.01.25.16	7	Kepala Dinas, Mitra (PGRI, HIMAPAUDI)	Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara Disdik dan mitra dalam pelaksanaan program atau kegiatan tertentu.	Miscommunication dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan program yang telah direncanakan.
17	Dinas pendid	Kerja sama dengan	ROO.24.01.25.17	7	Kepala Disdik dan Mitra	Baik pihak Disdik maupun mitra	Pejabat yang terlibat dapat

N o	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	ikan	mitra melanggar regulasi, peraturan pemerintah yang berlaku				mungkin tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, terutama peraturan baru atau yang jarang diterapkan.	dijerat pasal korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana lainnya sesuai KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18	Dinas pendidikan	Realisasi barang/jasa dengan spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi yang diatur dalam kontrak	ROO.24.01.25.18	10	Kepala dinas dan Mitra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kontrak tidak cukup detail atau ambigu dalam menjelaskan standar kualitas yang diharapkan.</li> <li>2. Tidak dilakukan analisis mendalam tentang ketersediaan barang/jasa dengan spesifikasi tertentu di pasar lokal.</li> </ol>	Tidak tercapainya nilai optimal dari investasi yang telah dilakukan dalam sektor pendidikan.

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko:

Tabel 7.

#### Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>				
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar kabupaten Lamongan
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	1. Memberikan Pemberian Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi 2. Melakukan sosialisasi program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 3. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	5. kurang minatnya guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 6. Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	1. Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	masih terdapat Kualitas SDM yang belum memenuhi standar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>				
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	1. Input dan Sinkronisasi Data secara berkala pada Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan 2. Membuat Jadwal jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk di ajukan penilaian akreditasi.	Satuan pendidikan tidak melakukan updating data pada aplikasi dapodik
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan Pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Banyak dokumen yang di minta pada instrumen akreditasi di mengerti oleh satuan pendidikan
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi dapodik secara berkala	Data sarpras pada dapodik banyak yang tidak diupdate sesuai kondisi
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada Peserta didik yang belum mendapat bantuan dari yang lainnya	Data diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	1. ANJAB Dinas Pendidikan 2. Data Analisis Kebutuhan oleh satuan pendidikan	Adanya perbedaan data Dapodik dengan Data Analisis Kebutuhan
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	1. Sosialisasi Tentang PAK 2. Input data di Aplikasi PMM	adanya sebagian guru yang belum memanfaatkan Aplikasi PMM
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua Satuan Pendidikan Sudah Terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK Valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi Cut Off
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	1. Semua Satuan Pendidikan Memiliki Juknis BOS/BOP 2. Di berikan layanan BOS/BOP secara daring dan luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada Juknis BOS/BOP



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu Mengingatn kepada Satuan Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKASnya mengalami kendala
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Nasih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi informasi
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Adanya Forum pendidik dan Tenaga kependidikan secara mandiri	Belum adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Koordinator komunitas
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	1. Membuat Inovasi BU EWIS 2. Membentuk TPPK	Adanya perbedaan persepsi tentang Bullying/tindak kekerasan pada satuan pendidikan
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Surat Undangan Sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya Satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah melaksanakan pekerjaan
16	Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dengan baik antara Disdik dan Mitra	ROO.24.01.25.16	Membuat forum konsultasi publik untuk menyelaraskan program Disdik dengan kebutuhan mitra	Tidak mengidentifikasi mitra yang berpotensi konflik kepentingan dengan program Disdik
17	Kerja sama dengan mitra melanggar regulasi, peraturan pemerintah yang berlaku	ROO.24.01.25.17	Setiap draft MoU/kontrak kerja sama WAJIB direview oleh Bagian Hukum	Legal review hanya formalitas, tidak substantif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
			sebelum ditandatangani - Membuat Legal Checklist yang harus dipenuhi untuk setiap jenis kerja sama	dalam menganalisis risiko hukum
18	Realisasi barang/jasa dengan spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi yang diatur dalam kontrak	ROO.24.01.25.18	Menyusun spesifikasi teknis yang detail dan terukur dalam dokumen kontrak Menolak penerimaan barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi	Spesifikasi terlalu umum, misalnya "kualitas baik" tanpa standar yang jelas

## E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risikoterdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

### 1. Menghindari risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

### 2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).

### 3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

### 4. Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

#### 5. Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. Dari pembahasan dalam tim maka ditetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan tergambar sebagaimana dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8.**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>					
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Jan s/d Juni 2025)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Tribulan 4 (Okt sd Des 2025)
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Jan sd Des 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodi		
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan II (April sd Jun 2025)
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>					
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Mart 2025)
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 3 (Juli sd Sep 2025)
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Maret 2025)
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April sd Jun 2025)
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK.	ROO.24.01.25.7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan	Januari dan Juli 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Penerima BOS/BOP		pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	dan Evaluasi	
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2025
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Jan - Des 2025
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agt 2025
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Juli 2025
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Jan - Des 2025
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2025
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juki - Agts 2025
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Jun - Des 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
16	Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dengan baik antara Disdik dan Mitra	ROO.24.01.25.16	Membentuk Tim Koordinasi gabungan Disdik-Mitra dengan pembagian peran yang jelas	Kepala Dinas dan Mintra	Jun - Des 2025
17	Kerja sama dengan mitra melanggar regulasi, peraturan pemerintah yang berlaku	ROO.24.01.25.17	Verifikasi legalitas dan kapasitas mitra (SIUP, TDP, NIB, dll) Menetapkan sanksi tegas untuk pelanggaran regulasi	Kepala Dinas dan Mintra	Jun - Des 2025
18	Realisasi barang/jasa dengan spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi yang diatur dalam kontrak	ROO.24.01.25.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan standar kualitas dengan parameter yang jelas (merek, tipe, grade)</li> <li>Menghindari istilah "setara" tanpa kriteria pembandingan yang spesifik</li> </ul>	Kepala Dinas dan Mintra	Jun - Des 2025

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu tim menentukan Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

Tabel 9.  
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Jan s/d Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Sosial Media Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan(Sekretariat Disdik)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Juli sd Sep 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Lurung/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan dan Guru	Jan - Maret 2025	dilaksanakan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan/Sekretriati	Pegawai Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan II (April sd Juni)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan III (Juli sd Sep 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PN	satuan Pendidikan	Tribulan I ( Jan sd Maret 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masy arakat	Tribulan III (Juli sd Sep 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
5	Melakukan perbaik data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Sosial Media Luring/daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan Operator Dapodik	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Prencanaan	Satuan Pendidikan/OPS	Januari - Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
8	Melakukan BIMTEK	Surat Undangan	Dinas Pendidikan/Sub bag	Satuan	Januari -	dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Prencanaan	Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Agustus 2025	pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	April - Mei 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan tenaga Pendidik	Juli - Agt 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Agustus - Okt 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Mei - Juli 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	April - Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/Publik	April - Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan kontraktor	Mei - Des 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
16	Membentuk Tim Koordinasi gabungan Disdik-Mitra dengan pembagian peran	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan dan Mitra	Dinas Pendidikan dan Mitra	Juni – Des 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	yang jelas					
17	Verifikasi legalitas dan kapasitas mitra (SIUP, TDP, NIB, dll) Menetapkan sanksi tegas untuk pelanggaran regulasi	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan dan Mitra	Dinas Pendidikan dan Mitra	Juni – Des 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan standar kualitas dengan parameter yang jelas (merek, tipe, grade)</li> <li>Menghindari istilah "setara" tanpa kriteria pembandingan yang spesifik</li> </ul>	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan dan Mitra	Dinas Pendidikan dan Mitra	Juni – Des 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN**

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 10.  
Rancangan Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. Mou Kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring Kegiatan	Kabid PNF	Tribulan 1 (Jan – Mar) tahun 2025	Feb 2025	Dilakukan secara berkala
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaria Dinas Pendidikan	Juli - Des 2025	Des 2025	Dilakukan secara berkala
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	1. Undangan Sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring Aplikasi Dapodik	Bidang GTK	Jan - Juni 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Kehadiran 4. Monev Kegiatan	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2025	Sep. 2025	Dilakukan secara berkala
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juli - Sep 2025	Juli 2025	Dilakukan secara berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juni - Agst 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan	Kabid SD,SMP dan PNF	Jan - Mar 2025	Feb 2025	Dilakukan secara berkala

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		4. Kehadiran				
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD,SMP dan PNF	Agus - Okt 2025	Agust 2025	Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan - Mar 2025	Jan dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan- Feb 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2025	Jan dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2025	Jan dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Sekrtaris Dinas Pendidikan	Jan dan Juli 2025	Jan dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Mei - Nov 2025	Mei - Nov 2025	Dilakukan secara berkala

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Juli - Des 2025	Juli - Des 2025	Dilakukan secara berkala
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2025	April - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Des 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala
16	Membentuk Tim Koordinasi gabungan Disdik-Mitra dengan pembagian peran yang jelas	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF ,GTK, dan Mitra	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
17	Verifikasi legalitas dan kapasitas mitra (SIUP, TDP, NIB, dll) Menetapkan sanksi tegas untuk pelanggaran regulasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF ,GTK, dan Mitra	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
18	Menetapkan standar kualitas dengan parameter yang jelas	1. Monev 2. Supervisi	Kabid SD, SMP, PNF ,GTK, dan	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	(merek, tipe, grade) Menghindari istilah "setara" tanpa kriteria pembandingan yang spesifik	3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Mitra			berkala



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Selanjutnya Pelaksanaan Penilaian Resiko disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022/23 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN  
PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO  
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

---

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	<b>2025</b>
Periode yang Dinilai	<b>2025</b>
Tujuan Strategis	Indeks Kesehatan
Urusan Pemerintahan	<b>Pendidikan</b>
OPD yang dinilai	Dinas Pendidikan
Tujuan Strategis Pemerintah	Indeks Kesehatan
Sasaran	1.meningkatkan kualitas pembangunan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.1	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	Eksternal	C	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan	Instansi, Pemda, dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	Internal	C	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan	Instansi, Pemda, dan Masyarakat
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.24.01.25.3	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	Internal	C	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan	Instansi, Pemda, Guru, dan Masyarakat
4	Nilai SAKIP Dinas	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	RSO.24.01.25.4	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak kompeten	Internal	C	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara	Instansi, Pemda, dan

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Pendidikan	yang tidak mencapai target			2. Integritas dan etika yang rendah			maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	Masyarakat

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	<b>2025</b>
Periode yang Dinilai	<b>2025</b>
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	<b>Pendidikan</b>
OPD yang Dinilai	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan yang terakreditasi B	Perencanaan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang belum akreditasi	ROO.24.01.25.1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. Adanya satuan pendidikan yang baru berdiri	Internal	C	1. Terlambat dalam pengumpulan data sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan pendidikan telat untuk penilaian	Instansi, Pemda, dan Satuan Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
										akreditasi	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan yang terakreditasi B	Pelaksanaan	Adanya satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Sd, SMP, dan PNF	1. Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	Internal	C	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai akreditasi yang belum naik minimal B	Instansi, Pemda, dan Satuan Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas	Perencanaan /pendataan	Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat	ROO.24.01.25.3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di	Internal	C	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. Salah	Instansi, Pemda, dan Satuan Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		sekolah sesuai standar		diterima		PNF	aplikasi DAPODIK			sasaran pemberian bantuan	
4	Penyediaan biaya personil bagi peserta didik	Peserta didik jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi yang berhak menerima biaya Personil Peserta Didik (Beasiswa Perintis)	Pelaksanaan	Resiko Fraud: Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan PNF	Data siswa yang diinput oleh sekolah pada aplikasi kurang valid, terdapat siswa yang mampu masuk ke dalam aplikasi PERINTIS	Internal	C	1. Meningkatkan angka putus sekolah 2. Pengentasan kemiskinan terhambat	Instansi, Pemda, dan Masyarakat
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Perencanaan	Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. Adanya kesenjangan kualitas	Guru/Tenaga Pendidik



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
							data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan			pendidikan	
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Perencanaan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru tidak bisa naik pangkat pada periode tersebut	Guru/Tenaga Pendidik
7	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Perencanaan	Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Satuan pendidikan tidak menerima dana BOS/BOP 2. Terhambatnya proses pembelajaran	Satuan Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
										n karena terbenturnya anggaran	
8	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pelaksanaan	Resiko Fraud : penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Satuan Pendidikan	1. Pemahaman yang kurang terhadap regulasi penggunaan dana BOS 2. Lemahnya sistem pengawasan internal di sekolah	Internal	C	1. Kerugian keuangan negara 2. Terhambatnya operasional sekolah 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah	Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, Masyarakat
9	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pelaporan	Satuan pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum memahami aplikasi ARKAS 2. Sering bergantinya dan update aplikasi	Internal	C	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
							ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya				
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan dengan baik	Pelaksanaan	Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta pelatihan tidak menguasai IT	Internal	C	Kompetensi peserta pelatihan yang tidak meningkat Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal	Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Terbentuknya komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang	Pelaksanaan	Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya	Internal	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		terfasilitasi					koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas				n
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pelaksanaan	Masih adanya tindakan perundungan dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	Kepala Dinas Pendidikan dan kabid SD, SMK, dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan	Internal	C	Terjadinya tindak perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia Sesuai Standar	Pendataan	Tidak tersampainya ke informasi ke satuan pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.1 3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan tidak menerima surat undangan sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan peserta didik yang berhak menerima
14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia Sesuai Standar	Pelaksanaan	Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.1 4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan peserta didik
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah sesuai standar	Pelaksanaan	Resiko kemitraan : Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.1 5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Eksternal	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Dinas Pendidikan, kontraktor dan satuan pendidikan

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelelesaian
1	1. Masih adanya budaya yang toleran terhadap pelanggaran yaitu "budaya diam" atau normalisasi terhadap perilaku tidak etis 2. Masih adanya pegawai tidak memahami dengan jelas batasan perilaku yang diperbolehkan 3. Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Pelatihan etika dan integritas berkala, kampanye anti budaya diam, penyediaan kanal aduan rahasia dan aman, serta pemberian penghargaan bagi pelapor berintegritas (tanpa mengungkap identitas). 2. Sosialisasi ulang kode etik pegawai, pembuatan buku saku etika dan perilaku kerja, serta integrasi kode etik dalam orientasi pegawai baru. 3. Membentuk tim kepatuhan dan pengawasan etika yang independen serta transparansi penanganan pelanggaran (secara umum dan tanpa menyebut nama) kepada seluruh pegawai agar timbul efek jera dan kesadaran kolektif.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
2	1. Alokasi dana tidak memadai untuk pelatihan dan pengembangan 2. Penugasan tidak selaras dengan kompetensi dan keahlian 3. Keengganan mempelajari keterampilan dan teknologi baru	1. Mengadakan pelatihan berbasis narasumber lokal (ASN berpengalaman melatih ASN baru), bekerjasama dengan instansi pelatihan seperti BPSDM, PPPPTK, atau universitas, dan memanfaatkan program pelatihan dari Kemendikbudristek atau Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bersifat gratis atau bersubsidi. 2. Melakukan pemetaan kompetensi berbasis SKP dan latar belakang pendidikan/pengalaman kerja, dan menyesuaikan serta memberikan pelatihan penunjang jika ditemukan ketidaksesuaian. 3. Mengadakan sesi motivasi adaptasi digital dimulai dengan pelatihan dasar-dasar teknologi (Ms. Excel, e-Office, Dapodik, dsb) menggunakan pendekatan bertahap dan berbasis praktik langsung (learning by doing).	Kepala Dinas Pendidikan	2025
3	1. Terciptanya zona nyaman sehingga terhambatnya sebuah	1. Mengadakan pelatihan/workshop rutin tentang	Kepala Dinas	2025

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyeleaian
	inovasi dan perubahan yang diperlukan 2. Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tapi belum terlaksana secara konsisten	pentingnya inovasi serta memberikan penghargaan terhadap pegawai yang mengusulkan atau menerapkan ide inovatif. 2. Melatih pegawai (terutama pejabat struktural dan pelaksana program) tentang penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal/SPIP.	Pendidikan	
4	1. Keterbatasan SDM 2. Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	1. Mendorong kolaborasi antar bidang/subbagian untuk saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Mendorong dan memfasilitasi pegawai adhoc untuk ikut seleksi CPNS/PPPK agar bisa menjadi bagian dari pegawai tetap.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
5	Masih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Mengkaji ulang dokumen SOP, uraian tugas (job description), dan struktur organisasi (SOTK) untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi mana saja yang perlu atau dapat didelegasikan.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Membentuk tim kerja lintas subbagian (perencanaan, kepegawaian, keuangan) untuk mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja pegawai ke dalam sistem perhitungan penghasilan (tunjangan kinerja) guna mendorong kinerja optimal dan budaya kerja produktif.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
7	APIP belum memahami sepenuhnya bagaimana dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Mengadakan sosialisasi dan workshop pengawasan berbasis resiko dengan mengundang narasumber dari BPKP atau Inspektorat Provinsi untuk memberikan pelatihan dan studi kasus.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas	Membentuk tim internal lintas bidang yang bertugas khusus	Kepala Dinas	2025

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

<b>No</b>	<b>Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai</b>	<b>Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian</b>	<b>Penanggung jawab</b>	<b>Target Waktu Pnyelelesaian</b>
	fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun hanya saja perlu adanya mekanisme tindak lanjut temuan	menindaklanjuti temuan pemeriksaan.	Pendidikan	



**formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2025					
No Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Dinas Pendidikan Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.1	7	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan

							tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak kompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang belum akreditasi	ROO.24.01.25.1	5	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. Adanya satuan pendidikan yang baru berdiri	1. Terlambat dalam pengumpulan data sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan pendidikan telat untuk penilaian akreditasi
2	Dinas Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Sd, SMP, dan PNF	1. Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai akreditasi yang belum naik minimal B

yang berlaku				
3	Dinas Pendidikan	Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3 7	<p>Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan PNF</p> <p>Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK</p> <p>1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. Salah sasaran pemberian bantuan</p>
4	Dinas Pendidikan	Resiko Fraud: Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4 7	<p>Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan PNF</p> <p>Data siswa yang diinput oleh sekolah pada aplikasi kurang valid, terdapat siswa yang mampu masuk ke dalam aplikasi PERINTIS</p> <p>1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengentasa kemiskinan terhambat</p>
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5 7	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK</p> <p>1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan</p> <p>1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. Adanya kesenjangan kualitas pendidikan</p>
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6 6	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK</p> <p>Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan</p> <p>Guru tidak bisa naik pangkat pada periode tersebut</p>
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7 4	<p>Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas</p> <p>Satuan pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada aplikasi DAPODIK</p> <p>1. Satuan pendidikan tidak menerima dana BOS/BOP 2. Terhambatnya proses pembelajaran karena terbenturnya anggaran</p>
8	Dinas	Resiko Fraud :	ROO.24.01.25.8 5	<p>Kepala Dinas</p> <p>1. Pemahaman yang kurang</p> <p>1. Kerugian keuangan</p>

	Pendidikan penyalahgunaan dana BOS			Pendidikan, Sekretaris Dinas, Satuan Pendidikan	terhadap regulasi penggunaan dana BOS 2. Lemahnya sistem pengawasan internal di sekolah	negara 2. Terhambatnya operasional sekolah 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah
9	Dinas Pendidikan	Satuan pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9 5	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum memahami aplikasi ARKAS 2. Sering bergantinya dan update aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10 7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta pelatihan tidak menguasai IT	1. Kompetensi peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal
11	Dinas Pendidikan	Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11 6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12 5	Kepala Dinas Pendidikan dan kabid SD, SMK, dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah</li> <li>2. Tata kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan</li> </ol>	Terjadinya tindak perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak tersampainya informasi ke satuan pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13 5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan tidak menerima surat undangan sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14 5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Resiko kemitraan : Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15 6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala cuaca yang tidak menentu</li> <li>2. Pencairan dana yang terlambat</li> </ol>	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

**formulir Kertas Kerja**  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.1	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar Kabupaten Lamongan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintah desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Januari s.d. Juni 2025)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Memberikan Beasiswa PERINTIS untuk peserta didik dari keluarga miskin dari	Keterbatasan anggaran sehingga masih ada peserta didik yang	1. Memprioritaskan peserta didik dari keluarga miskin yang belum mendapat	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 4 (Oktober s.d. Desember

			jenjang SD sampai Perguruan Tinggi	memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa	bantuan dari program lain 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk beasiswa	Pendidikan	2025)
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.24.01.25.3	1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada guru akan pentingnya sertifikat pendidik	1. Kurangnya minat guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 2. Masih banyak guru yang belum terdata di aplikasi Dapodik	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Januari s.d. Desember 2025
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	1. Perbup No. 29 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	Masih terdapat kualitas SDM yang belum memenuhi standar	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada semua pegawai	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April s.d. Juni 2025)

Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:

1	Resiko Kepatuhan : Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang	ROO.24.01.25.1	1. Input dan sinkronisasi data secara berkala pada aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan 2. Membuat jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk	Satuan pendidikan tidak melakukan update data pada aplikasi Dapodik	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
---	---	----------------	---	---	---	---	--------------------------------------

belum akreditasi		diajukan penilaian akreditasi					
2	Resiko Kepatuhan : Adanya satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Satuan pendidikan belum memiliki pemahaman yang baik terhadap dokumen-dokumen yang diminta dalam instrumen akreditasi	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN-SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 3 (Juli s.d. September 2025)
3	Resiko Kepatuhan : Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik secara berkala	Data sarpras pada Dapodik banyak yang belum diupdate sesuai kondisi	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan cek kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
4	Resiko Fraud : Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada peserta didik yang belum mendapat bantuan	Data yang diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan	1. Melakukan sosialisasi 2. Pengajuan penambahan anggaran beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April s.d. Juni 2025)
5	Resiko Kepatuhan : Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	1. ANJAB Dinas Pendidikan 2. Data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Adanya perbedaan data Dapodik dengan data analisis kebutuhan	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
6	Resiko Kepatuhan : Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	1. Sosialisasi tentang PAK 2. Input data di aplikasi PMM	Adanya sebagian guru yang belum memanfaatkan aplikasi PMM	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan e-kinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)



7	Resiko Kepatuhan : Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua satuan pendidikan sudah terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi cut off	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satuan pendidikan untuk pengerjaan Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari dan Juli 2025
8	Resiko Fraud : penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	1. Semua satuan pendidikan memiliki juknis BOS/BOP 2. Diberikan layanan BOS/BOP secara daring an luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada juknis BOS/BOP	Melakukan BIMTEK dan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2025
9	Resiko Kepatuhan : Satuan pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKAS-nya mengalami kendala	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/luring	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Januari - Desember 2025
10	Resiko Kemitraan : Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Masih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi informasi	Melakukan pelatihan dan BIMTEK agar semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agustus 2025
11	Resiko Kemitraan : Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Adanya forum pendidik dan tenaga kependidikan secara mandiri	Belum adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan koordinator komunitas	Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Juni 2025
12	Resiko Kepatuhan : Masih adanya tindakan	ROO.24.01.25.12	1. Membuat inovasi BU EWIS	Adanya perbedaan persepsi tentang	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan	Kepala Dinas Pendidikan dan	Januari - Desember

perundungan dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan		2. Membentuk TPPK	bullying atau tindak kekerasan pada satuan pendidikan	pendidikan	Kabid	2025
13 Resiko Kemitraan : Tidak tersampainya informasi ke satuan pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Surat undangan sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi	Menyampaikan informasi melalui surat, website, dan media sosial	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2025
14 Resiko Kepatuhan : Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	Masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juli - Agustus 2025
15 Resiko Kemitraan : Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah mengerjakan pekerjaan	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Juni - Desember 2025

**formulir Kertas Kerja**  
Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintah desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintah Desa terkait	Januari s.d. Juni 2025	Januari s.d. Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan peserta didik dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Media Sosial Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan (Sekretariat Disdik)	Instansi terkait, satuan pendidikan, peserta didik, dan mahasiswa	Juli s.d. September 2025	Juli s.d. September 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan satuan pendidikan	Satuan pendidikan dan guru	Januari s.d. Maret 2025	Januari s.d. Maret 2025	dilaksanakan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada semua pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan/ Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan	Juli s.d. September 2025	Juli s.d. September 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

#### Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:

1	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/Daring Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan	Tribulan II (April s.d. Juni 2025)	Tribulan II (April s.d. Juni 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN-SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/Daring Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan	Tribulan III (Juli s.d. September 2025)	Tribulan III (Juli s.d. September 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan cek kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2025)	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan sosialisasi 2. Pengajuan penambahan anggaran beasiswa	Surat Undangan Media Sosial	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masyarakat	Tribulan III (Juli s.d. September 2025)	Tribulan III (Juli s.d. September 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu

					2025)	2025)	
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Media Sosial Luring/Daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan operator Dapodik	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2025)	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2025)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan e-kinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Media Sosial	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2025)	Tribulan I (Januari s.d. Maret 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satuan pendidikan untuk pengerjaan Dapodik	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Media Sosial	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan pendidikan/OPS	Januari s.d. Agustus 2025	Januari s.d. Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
8	Melakukan BIMTEK dan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Media Sosial	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Januari s.d. Agustus 2025	Januari s.d. Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/luring	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Media Sosial	Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas	Satuan pendidikan/Bendahara BOS/BOP	April s.d. Mei 2025	April s.d. Mei 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
10	Melakukan pelatihan dan BIMTEK agar semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Media Sosial	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan pendidikan dan tenaga pendidik	Juli s.d. Agustus 2025	Juli s.d. Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Media Sosial	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan pendidikan/Bidang GTK	Agustus s.d. Oktober 2025	Agustus s.d. Oktober 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

12	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan pendidikan dan peserta didik	Mei s.d. Juli 2025	Mei s.d. Juli 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi melalui surat, website, dan media sosial	Surat Undangan Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan pendidikan dan peserta didik	April s.d. Juni 2025	April s.d. Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/publik	April s.d. Agustus 2025	April s.d. Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan pendidikan dan kontraktor	Mei s.d. Desember 2025	Mei s.d. Desember 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

**formulir Kertas Kerja**

## Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:					
1 Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintah desa setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. MoU kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring kegiatan	Kabid PNF	Tribulan I (Januari - Maret 2025)	Februari 2025	Dilakukan secara berkala
2 1. Memprioritaskan peserta didik dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Desember 2025	Desember 2025	Dilakukan secara berkala
3 1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input	1. Undangan sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring	Bidang GTK	Januari - Juni 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala

**Laporan Pelaksanaan Penilaian****Resiko Dinas Pendidikan 2025**..... 76

	data guru pada aplikasi Dapodik	Aplikasi Dapodik				
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada semua pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Monev Kegiatan	Juli - September 2025	September 2025	Dilakukan secara berkala	
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD, SMP, dan PNF	Juli - September 2025	Juli 2025	Dilakukan secara berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN-SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD, SMP, dan PNF	Juni - Agustus 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan cek kondisi sarpras langsung ke lokasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD, SMP, dan PNF	Januari - Maret 2025	Februari 2025	Dilakukan secara berkala
4	1. Melakukan sosialisasi 2. Pengajuan penambahan anggaran beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid SD, SMP, dan PNF	Agustus - Oktober 2025	Agustus 2025	Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid GTK	Januari - Maret 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan e-kinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid GTK	Januari - Februari 2025	Januari 2025	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satuan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat U 4. Kasubag		Januari dan Juli	Januari dan Juli	Dilakukan



	pendidikan untuk pengerjaan Dapodik	Kehadiran 5. Daring/Luring	Perencanaan	2025	2025	secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kasubag Perencanaan	Januari dan Juli 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/luring	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Sekretaris Dinas Pendidikan	Januari dan Juli 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
10	Melakukan pelatihan dan BIMTEK agar semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid GTK	Mei - November 2025	Mei - November 2025	Dilakukan secara berkala
11	Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid GTK	Juli - Desember 2025	Juli - Desember 2025	Dilakukan secara berkala
12	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi melalui surat, website, dan media sosial	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. Daring/Luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2025	April - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. Daring/Luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Desember 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala

**formulir Kertas Kerja**  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:										
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.1	Januari 2025	1. Banyak yang sudah berumah tangga 2. Banyak penduduk Lamongan yang bekerja di luar Lamongan	Angka rata-rata lama sekolah menurun	Penyebab RLS menjadi turun	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintah desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Tribulan I (Januari - Maret 2025)	Februari 2025	Dilakukan secara berkala

2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Juli 2025	1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Adanya perkawinan dini	1. Angka kemiskinan yang bertambah tinggi 2. Menurunnya Angka Harapan Lama Sekolah	Penyebab HLS menurun	1. Memprioritaskan peserta didik dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk beasiswa	Juli - Desember 2025	Desember 2025	Dilakukan secara berkala
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.24.01.25.3	2025	1. Belum memiliki kualifikasi S1/D4 2. Belum terdaftar di aplikasi Dapodik	Guru tidak bisa mengikuti Tes PPG untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	Penyebab guru tidak memiliki sertifikat pendidik	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Januari - Juni 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	2025	Masih adanya kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Hasil Evaluasi SAKIP menjadi rendah	Penyebab Skor SAKIP rendah	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada semua pegawai	Juli - September 2025	September 2025	Dilakukan secara berkala

Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:

1	Resiko Kepatuhan : Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang belum akreditasi	ROO.24.01.25.1	2025	Adanya Satuan Pendidikan yang terlambat mengirim Data Akreditasi	Tidak dapat diikuti sertakan dalam penilaian akreditasi	Terlambat dalam pengiriman data ke satuan pendidikan	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi	Juli - September 2025	Juli 2025	Dilakukan secara berkala
2	Resiko Kepatuhan : Adanya satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	2025	Sarana prasarana satuan pendidikan yang belum memenuhi standar	Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan belum mencapai predikat B	Akreditasi yang belum mencapai predikat B	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN-SM	Juni - Agustus 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
3	Resiko Kepatuhan : Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	2025	Satuan Pendidikan tidak upload berkas kondisi bangunan di dalam aplikasi Dapodik	Satuan pendidikan tidak dapat menerima bantuan karena datanya tidak ada	-	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan cek kondisi sarpras langsung ke lokasi	Januari - Maret 2025	Februari 2025	Dilakukan secara berkala
4	Resiko Fraud : Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	2025	1. Tidak dapat memenuhi syarat 2. Keterbatasan dana untuk beasiswa	Masih adanya peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima Beasiswa	Sebab keluarga miskin tidak menerima beasiswa	1. Melakukan sosialisasi 2. Pengajuan penambahan anggaran beasiswa	Agustus - Oktober 2025	Agustus 2025	Dilakukan secara berkala

5	Resiko Kepatuhan : Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	2025	Adanya keterlambatan data analisis yang diterima oleh dinas pendidikan	Adanya kelebihan formasi ASN sementara ada formasi ASN yang kosong	Formasi ASN yang tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Januari - Maret 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
6	Resiko Kepatuhan : Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	2025	Adanya guru yang belum memenuhi syarat untuk naik pangkat	Guru tersebut tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat pada periode tersebut	Belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan e-kinerja di PMM	Januari - Februari 2025	Januari 2025	Dilakukan secara berkala
7	Resiko Kepatuhan : Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	2025	Masih ada satuan pendidikan yang belum update data dapodik sampai batas cut off yang ditetapkan	Satuan pendidikan tidak dapat menerima BOS/BOP	Pengambilan data untuk BOS/BOP setiap tanggal 31 Agustus	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satuan pendidikan untuk pengerjaan Dapodik	Januari dan Juli 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
8	Resiko Fraud : penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	2025	Adanya persepsi yang berbeda tentang juknis BOS/BOP	Adanya temua BPK/Inspektorat bahwa laporan dana BOS/BOP tidak sesuai dengan juknis	Adanya SPJ yang tidak sesuai dengan Juknis	Melakukan BIMTEK dan sosialisasi ke satuan pendidikan	Januari dan Juli 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala
9	Resiko Kepatuhan : Satuan pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah	ROO.24.01.25.9	2025	Seringkali pada satuan Pendidikan Aplikasi ARKASnya terjadi eror dan juga Bendahara	Satuan pendidikan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan sanksi dengan pemotongan	Sering terjadi eror pada ARKAS	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/luring	Januari dan Juli 2025	Januari dan Juli 2025	Dilakukan secara berkala

	ditetapkan		BOS/BOP yang kurang menguasai aplikasi ARKAS	dana BOS/BOP pada tahun berikutnya					
10	Resiko Kemitraan : Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10 2025	Banyak peserta yang kurang menguasai IT	Peserta pelatihan tidak memahami aplikasi yang menjadi materi pelatihan	Aplikasi di bidang pendidikan yang harus di kuasai oleh guru	Melakukan pelatihan dan BIMTEK agar semua guru menguasai IT	Mei - November 2025	Mei - November 2025	Dilakukan secara berkala
11	Resiko Kemitraan : Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11 2025	Kurang adanya koordinasi antara dinas pendidikan dengan koordinator komunitas	Tenaga pendidik dan kependidikan tidak memiliki wadah sebagai tempat belajar dan berbagi bersama	-	Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Juli - Desember 2025	Juli - Desember 2025	Dilakukan secara berkala
12	Resiko Kepatuhan : Masih adanya tindakan perundungan dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12 2025	Adanya saling mengolok-olok antar peserta didik	Adanya tindak bullying ke peserta didik yang dalam posisi lemah	Tindak perundungan biasanya terjadi pada siswa yang lemah	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Dilakukan secara berkala
13	Resiko Kemitraan : Tidak tersampainya informasi ke satuan pendidikan untuk	ROO.24.01.25.13 2025	Satuan pendidikan tidak update informasi melalui WA atau sosial	Satuan pendidikan tidak dapat mengusulkan peserta didik untuk mendapat bantuan	Update informasi sangan di butuhkan	Menyampaikan informasi melalui surat, website, dan media sosial	April - Juli 2025	April - Juli 2025	Dilakukan secara berkala

	pendataan peserta didik yang berhak menerima		media	perlengkapan siswa					
14	Resiko Kepatuhan : Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14 2025	Pengadaan barang yang tidak sesuai dengan juknis	Peserta didik menerima barang dengan kualitas rendah	-	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Mei - Juli 2025	Mei - Juli 2025	Dilakukan secara berkala
15	Resiko Kemitraan : Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15 2025	Pengerjaan dilakukan di akhir tahun	Belum selesainya pekerjaan dengan tepat waktu sehingga dikenakan denda sesuai dengan juknis yang berlaku	-	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan juknis yang berlaku	Mei - Desember 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala